



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PROGRAM DAN KEGIATAN DEFINITIF PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - b. bahwa penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengedepankan asas afektifitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terukur;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kota Tahun 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program dan Kegiatan Definitif Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM DAN KEGIATAN DEFINITIF PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur (*outcome*) pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

## Pasal 2

Program dan kegiatan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. efektif dan efisien dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kota serta pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- c. akuntabel dan terukur dalam bentuk penetapan indikator untuk menilai keberhasilan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

## Pasal 3

Program dan kegiatan definitif Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 ditujukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Tahun 2020 yang berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam hal belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019- 2023; dan

- b. pedoman Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Program dan kegiatan definitif Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 meliputi nomenklatur Program dan Kegiatan untuk masing-masing Urusan Pemerintahan serta Indikator Kinerja untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

#### Pasal 5

- (1) Nomenklatur Program dan Kegiatan untuk masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi program dan kegiatan yang bersumber dan atau dibiayai dari Dana Alokasi Umum dan Dana Khusus.
- (2) Dana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Provinsi (Dana Banprop), Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta dana-dana lain yang tidak bersumber dari APBD Kota Probolinggo.

#### Pasal 6

- (1) Hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2020 wajib mengacu pada Daftar Program dan Kegiatan Definitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Perubahan dan atau penambahan program dan kegiatan Tahun 2020 dapat dilakukan hanya untuk program dan kegiatan yang bersumber dan atau dibiayai dari Dana Khusus dengan mengacu pada petunjuk teknis dari masing-masing sumber dana.

#### Pasal 7

Daftar Nomenklatur Program dan Kegiatan untuk masing-masing Urusan Pemerintahan serta Indikator Kinerja untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 8 Januari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG PROGRAM DAN KEGIATAN DEFINITIF  
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
 TAHUN 2020

**PROGRAM DAN KEGIATAN DEFINITIF PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020**

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH	
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>					
<b>A.1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>					
A.1.1	Pendidikan	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	Rutin / Kesekretariatan	Disdikpora
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Persentase Penduduk Usia 5 - 6 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar PAUD</b>		
		2.1	Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar mutu		
		2.2	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah satuan PAUD yang terpenuhi Sarana Prasarannya	Dana Khusus (DAK)	

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	2.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Jumlah satuan PAUD yang terpenuhi Biaya Operasionalnya	Dana Khusus (DAK)	
	<b>3</b>	<b>Pendidikan Masyarakat</b>	<b>Persentase Penduduk Usia 15 - 59 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar</b>		
	3.1	Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Jumlah Satuan Dikmas yang memenuhi standar mutu		
	3.2	Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta	Jumlah Madrasah Diniyah dan Sekolah Swasta yang terpenuhi BOP	Dana Khusus (Banprov)	
	<b>4</b>	<b>Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Persentase Penduduk Usia 7 - 12 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SD</b></li> <li>▪ <b>Persentase Penduduk Usia 13 - 15 thn yang sedang belajar atau sudah tamat belajar SMP</b></li> <li>▪ <b>Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terpenuhi Sarana Prasarana</b></li> </ul>		
	4.1	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SD	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memenuhi standar mutu		
	4.2	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terpenuhi Biaya Operasionalnya		
	4.3	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Jenjang SMP	Jumlah satuan pendidikan SMP yang memenuhi standar mutu		
	4.4	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SMP	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang terpenuhi Biaya Operasionalnya		
	4.5	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang terpenuhi Sarana Prasarananya		
	4.6	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah satuan pendidikan SD yang terpenuhi sarana prasarana	Dana Khusus (DAK)	
	4.7	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan SMP yang terpenuhi sarana prasarana	Dana Khusus (DAK)	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		4.8	Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terpenuhi Biaya Operasionalnya	Hibah BOS	
		<b>5</b>	<b>Pengembangan Keprofesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan</b>	<b>Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		
		5.1	Peningkatan mutu Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi standar mutu kompetensi		
		5.2	Peningkatan mutu Kompetensi Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar mutu kompetensi		
<b>A.1.2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>Dinkes</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat</b>	<b>Persentase Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat</b>		
		2.1	Peningkatan Kesehatan Keluarga	1. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan ANC Sesuai Standar 2. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Persalinan Sesuai Standar 3. Jumlah Pelayanan Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4. Jumlah Pelayanan Balita yang Mendapat		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5. Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Screening Kesehatan Sesuai Standar 6. Jumlah Warga yang Berusia 60 tahun ke atas yang Mendapat <i>Screening</i> Kesehatan Sesuai Standar		
		2.2	Peningkatan Gizi Masyarakat	Prevalensi Penurunan Kurang Gizi		
		2.3	Pelayanan Jaminan Persalinan	1. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Pertolongan Persalinan Sesuai Standar 2. Jumlah Pelayanan Bayi Paripurna	Dana Khusus (DAK non fisik)	
		2.4	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Promosi Kesehatan yang dilaksanakan 2. Jumlah upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang sesuai standar		
		2.5	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan	1. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak 2. Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM		
		2.6	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	1. Jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang terbentuk 2. Jumlah kelompok masyarakat di wilayah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		
		<b>3</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Akibat Dampak Rokok</b>	<b>Persentase Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Akibat Dampak Rokok</b>	<b>Dana Khusus Pajak Rokok</b>	
		3.1	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Akibat Dampak Rokok	Jumlah Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat akibat dampak rokok	Dana Khusus Pajak Rokok	
		3.2	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Akibat Dampak Rokok	Jumlah Kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi akibat dampak rokok	Dana Khusus Pajak Rokok	
		3.3	Peningkatan Kesehatan Lingkungan,	Jumlah kegiatan kesehatan lingkungan,	Dana Khusus	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Kesehatan Kerja dan Olahraga Akibat Dampak Rokok	kesehatan kerja dan olahraga akibat dampak rokok	Pajak Rokok	
		<b>4</b>	<b>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</b>		
		4.1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar</li> <li>2. Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> </ol>		
		4.2	Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kelurahan yang Mencapai Target Universal Child Immunization (UCI)</li> <li>2. Jumlah kasus wabah dan atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditemukan dan ditangani</li> </ol>		
		<b>5</b>	<b>Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Penyalahgunaan Napza</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>		
		5.1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelayanan kesehatan setiap warga negara usia 15-59 th yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar</li> <li>2. Jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>3. Jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>4. Jumlah pelayanan kesehatan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</li> </ol>		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			(ODGJB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
	5.2	Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Napza		
	<b>6</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Dampak Rokok</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Dampak Rokok</b>	<b>Dana Khusus Pajak Rokok</b>	
	6.1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Akibat Dampak Rokok	Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Akibat Dampak Rokok	Dana Khusus Pajak Rokok	
	6.2	Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah Akibat Dampak Rokok	Jumlah Kegiatan Pelayanan Imunisasi, Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah Akibat Dampak Rokok	Dana Khusus Pajak Rokok	
	6.3	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Akibat Dampak Rokok	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Akibat Dampak Rokok	Dana Khusus Pajak Rokok	
	<b>7</b>	<b>Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan</b>	<b>Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar</b>		
	7.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi	1. Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Dibina 2. Jumlah sediaan farmasi yang tersedia di Instalasi Farmasi Kesehatan		
	7.2	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan	Jumlah macam obat dan alkesyang tersedia di Instalasi Farmasi Kesehatan	Dana Khusus (DAK)	
	7.3	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	Jumlah Tenaga Fungsional Kesehatan yang Mendapat Pelatihan		
	7.4	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pelayanan Primer, Rujukan, Kesehatan Tradisional yang Memenuhi Standar		
	7.5	Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Wonoasih	UPT Puskesmas	
	7.6	Pengelolaan Pelayanan Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	UPT Puskesmas	

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		Ketapang	Ketapang		
	7.7	Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kanigaran	UPT Puskesmas	
	7.8	Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Sukabumi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Sukabumi	UPT Puskesmas	
	7.9	Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Jati	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Jati	UPT Puskesmas	
	7.10	Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Kedopok	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kedopok	UPT Puskesmas	
	7.11	Pengelolaan Pelayanan Labkesda	Indeks Kepuasan Masyarakat di Labkesda	UPT Labkesda	
	<b>8</b>	<b>Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya</b>	<b>Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya</b>	<b>Dana Khusus (DAK)</b>	
	8.1	Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar	Dana Khusus (DAK)	
	8.2	Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	Jumlah alat kesehatan yang memenuhi standar	Dana Khusus (DAK)	
	<b>9</b>	<b>Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Masyarakat Miskin Non PBI yang Mendapat Pelayanan Kesehatan</b>		
	9.1	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	1. Jumlah Masyarakat Miskin Non PBI yang Dibayarkan Biaya Pelayanan Kesehatannya oleh Pemerintah Daerah 2. Jumlah masyarakat miskin PBI yang Dibayarkan Biaya Pelayanan Kesehatannya oleh Pemerintah Daerah		
	<b>10</b>	<b>Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok</b>	<b>Presentase Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok</b>	<b>Dana Khusus (Pajak Rokok)</b>	
	10.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok	Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok	Dana Khusus (Pajak Rokok)	
	10.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Akibat Dampak Rokok	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Akibat Dampak Rokok	Dana Khusus (Pajak Rokok)	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		10.3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif Akibat Dampak Rokok	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif Akibat Dampak Rokok	Dana Khusus (Pajak Rokok)	
		<b>11</b>	<b>Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai standar</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	
		11.1	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Wonoasih yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Wonoasih yang dipelihara	Dana Khusus (DBHCHT)	
		11.2	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Ketapang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Ketapang yang dipelihara	Dana Khusus (DBHCHT)	
		11.3	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kanigaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Kanigaran yang dipelihara	Dana Khusus (DBHCHT)	
		11.4	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Sukabumi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Sukabumi yang dipelihara	Dana Khusus (DBHCHT)	
		11.5	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan Puskesmas Jati yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Jati yang dipelihara	Dana Khusus (DBHCHT)	
		11.6	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas	Dana Khusus (DBHCHT)	

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		Fasilitas Kesehatan Puskesmas Kedopok yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Kedopok yang dipelihara		
	<b>12</b>	<b>Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Dana Khusus (DAK Non Fisik)</b>	
	12.1	Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Wonoasih	Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Wonoasih	Dana Khusus (DAK Non Fisik)	
	12.2	Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Ketapang	Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Ketapang	Dana Khusus (DAK Non Fisik)	
	12.3	Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Kanigaran	Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Kanigaran	Dana Khusus (DAK Non Fisik)	
	12.4	Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Sukabumi	Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Sukabumi	Dana Khusus (DAK Non Fisik)	
	12.5	Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Jati	Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Jati	Dana Khusus (DAK Non Fisik)	
	12.6	Bantuan Oprasional Kesehatan pada Puskesmas Kedopok	Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas Kedopok	Dana Khusus (DAK Non Fisik)	
	12.7	Management Batuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Cakupan kegiatan management penunjang kegiatan promotif dan preventif	Dana Khusus (DAK Non Fisik)	
	12.8	Bantuan Operasional Distribusi Obat E-Logistik	Jumlah kegiatan pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kesehatan	Dana Khusus (DAK Non Fisik)	
	<b>13</b>	<b>Jaminan Kesehatan Nasional</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional</b>	<b>Dana Kapitasi JKN (DAU)</b>	
	13.1	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Wonoasih	1. Angka Kontak 2. Rasio rujukan non spesialisistik 3. Rasio peserta prolanis		
	13.2	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ketapang	1. Angka Kontak 2. Rasio rujukan non spesialisistik 3. Rasio peserta prolanis		
	13.3	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas	1. Angka Kontak 2. Rasio rujukan non spesialisistik		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kanigaran	3. Rasio pesertaprolanis		
	13.4	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukabumi	1. Angka Kontak 2. Rasio rujukan non spesialisik 3. Rasio prolanis		
	13.5	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jati	1. Angka Kontak 2. Rasio rujukan non spesialisik 3. Rasio prolanis		
	13.6	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kedopok	1. Angka Kontak 2. Rasio rujukan non spesialisik 3. Rasio prolanis		
	<b>14</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Labkesda</b>	<b>Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas dan Labkesda</b>		
	14.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Wonoasih		
	14.2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Ketapang	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Ketapang		
	14.3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Kanigaran		
	14.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Sukabumi	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Sukabumi		
	14.5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Jati	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Jati		
	14.6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Kedopok	Kedopok		
		14.7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)		
		15	<b>Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Moh Saleh</b>	<b>Presentase Peningkatan Loyalitas Pelanggan RS</b>	Dana BLUD	RSUD Dr. Moh Saleh
				<b>Presentase pencapaian standarisasi pelayanan (KARS)</b>		
				<b>presentase pengembangan produk pelayanan kesehatan</b>		
				<b>Presentase Pencapaian Standarisasi pendidikan, penelitian yang berkualitas</b>		
				<b>presentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai standart</b>		
				<b>Presentase Peningkatan Kompetensi dan Budaya Organisasi berbasis IT</b>		
				<b>Presentase Peningkatan tata kelola keuangan RS</b>		
				<b>Presentase pencapaian indikator SPM RS</b>		
		15.1	Pelayanan serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan pasien eksternal	Dana BLUD	
				Persentase Peningkatan kunjungan Pasien Internal		
				Jumlah KSO, MOU yang aktif		
				Jumlah pembentukan komunitas layanan		
				Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal		
				Indeks kepuasan Pelanggan Internal		
				Jumlah komplain terhadap pelayanan Medis Rs		
				Jumlah komplain terhadap pelayanan Keperawatan Rs		
			Jumlah komplain terhadap pelayanan			

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				Penunjang RS		
				Jumlah komplain terhadap pelayanan Admistrasi RS		
				Jumlah pengembangan		
				Persentase penurunan Management Resiko		
				Jumlah Keselamatan Pasien, angka kejadian (KTD,KNC,KPC)		
				Angka Kejadian kecelakaan kerja Karyawan		
				Pencapaian Nilai Akreditasi Pelayanan ( KARS )		
				Pencapaian Status Akreditasi Rumah sakit Pendidikan		
				Jumlah audit internal		
				Jumlah audit internal yang ditindak lanjuti		
				Persentase ketersediaan Sarana Rs		
				Persentase ketersediaan Prasarana Rs		
				Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana RS		
				Persentase pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan RS		
				Presentase karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun		
				Persentase pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standart		
				Jumlah karyawan yang mendapatkan pendidikan		
				Jumlah pohon penelitian		
				Jumlah penelitian yang dimanfaatkan		
				Jumlah Modul SIMRS yang dikembangkan		
				Jumlah modul SIMRS yang dimanfaatkan		
				Presentasi CRR		
				Jumlah pelaksanaan Auditor eksternal		
				Jumlah Pendapatan Fungsional pertahun		
				Prosentase Efisiensi Anggaran (biaya persediaan		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			pertahun )		
	<b>16</b>	<b>Peningkatan Sarana Prasarana dan Layanan Rumah Sakit</b>	<b>a. Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang disediakan</b> <b>b. Persentase Peningkatan Pasien Rujukan dari FKTP</b>	<b>Dana-dana Khusus dan DAU</b>	
	16.1	Pengadaan Alat Alat Kesehatan	Prosentase Alat Kesehatan yang terpenuhi melalui anggaran DAK	Dana Khusus (DAK)	
	16.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Rujukan Nasional,Provinsi,dan Regional yang belum memenuhi standar Kelas	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi yang terlaksana dari anggaran DAK	Dana Khusus (DAK)	
	16.3	Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi standar Kelas	Prosentase Prasarana RS yang terlaksana dari anggaran DAK	Dana Khusus (DAK)	
	16.4	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Bantuan Keuangan Provinsi	Prosentase Pembangunan/Pemeliharaan Gedung RS yang terpenuhi dari anggaran Banprov	Dana Khusus (Banprov)	
	16.5	Pengadaan Alat dan Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit Bantuan Provinsi	Prosentase Alat, Sarana dan Prasarana Penunjang yang terpenuhi melalui anggaran Banprov	Dana Khusus (Banprov)	
	16.6	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Prosentase terselenggaranya PKRS yang terlaksana dari anggaran Pajak Rokok	Dana Khusus (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok)	
	16.7	Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya	Prosentase Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan yang terpenuhi dari anggaran Pajak Rokok	Dana Khusus (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok)	
	16.8	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit yang disediakan	DAU	
	16.9	Pelayanan Kesehatan di RSUD	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan Layanan Pembiayaan	DAU	
	<b>17</b>	<b>Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Presentase peningkatan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana RS</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				<p><b>dana DBHCHT yang terpenuhi</b></p> <p><b>Presentase Alat Kedokteran dan Penunjang yang terpenuhi dari Anggaran DBHCHT</b></p>		
		17.1	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Prosentase Pemeliharaan/Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung RS dari anggaran DBHCHT	Dana Khusus (DBHCHT)	
		17.2	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan dan penunjang	Jumlah Alat Kedokteran dan fasilitas penunjang lain yang terpenuhi dari anggaran DBHCHT	Dana Khusus (DBHCHT)	
<b>A.1.3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>DPUPR</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	<p>a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu</p> <p>b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%</p>		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	<p>a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran</p> <p>b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu</p> <p>c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</p>		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Kebinamargaan</b>	<b>Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap</b>		
		2.1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun		
		2.2	Pengelolaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Terpelihara dengan Baik		
	2.3	Penyelenggaraan Pematuan Jalan Kota	Panjang Pematuan / Drainase Jalan Kota yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik		
	2.4	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun	Dana Khusus (DAK)	
	2.5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terpelihara dengan Baik	Dana Khusus (DAK)	
	<b>3</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik</b>		
	3.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terbangun		
	3.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terpelihara		
	3.3	Penatagunaan Sumber Daya Air	Jumlah Warga yang Diikutsertakan dalam Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air		
	3.4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa	Panjang jaringan irigasi dan drainase yang terpelihara	Dana Khusus (DAK)	
	<b>4</b>	<b>Pengawasan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase Pengawasan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang Baik</b>		
	4.1	Penyelenggaraan Perijinan Jasa Konstruksi,	Jumlah ijin Jasa konstruksi		
	4.2	Pemberdayaan, dan Pembinaan SDM Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah SDM Jasa konstruksi, dan Pengawasan yang terlatih		
	<b>5</b>	<b>Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Ruang, bangunan dan lingkungan yang Sesuai Ketentuan</b>		
	5.1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi SKRK		
	5.2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah rekomendasi IMB		
	<b>6</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Keciptakarya</b>	<b>Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi</b>		
	6.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Pembangunan Sambungan Rumah		
	6.2	Pembangunan dan Pengelolaan	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	yang Terbangun dan Terpelihara		
		6.3	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum yang terbangun dan terpelihara		
		6.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik	Jumlah Pembangunan IPAL Komunal yang Ramah Lingkungan	Dana Khusus (DAK)	
		6.5	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Pembangunan Sambungan Rumah	Dana Khusus (DAK)	
<b>A.1.4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>Disperkim</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU</b>		
		2.1	Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani Panjang Drainase yang Ditangani		
		2.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Permukiman Kumuh yang Ditangani		
		2.3	Stimulasi Penyediaan Perumahan	Jumlah RTLH yang Ditangani		
		2.4	Fasilitasi Penyediaan Perumahan	Jumlah RTLH yang Ditangani	DAK	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH	
		2.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani Panjang Drainase yang Ditangani	Dana Khusus – Pajak Rokok		
		2.6	Pencegahan Kawasan Kumuh Perkotaan	Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	Dana Khusus – Pajak Rokok		
		2.7	Pengelolaan UPTD Rusunawa	Persentase Fasilitas Rusunawa Dalam Kondisi Baik Capaian Target PAD UPTD Rusunawa			
<b>A.1.5</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>						
<b>A.1.5.1</b>	<b>Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>Satpol PP</b>	
1.1		Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%				
1.2		Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu				
1.3		Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%				
<b>2</b>		<b>Penegakan PERDA dan PERKADA</b>	<b>Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada</b>				
2.1		Operasi Penegakan PERDA dan PERKADA	Jumlah operasi dalam 1 tahun Jumlah Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang ditangani				
2.2		Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA dan PERKADA	Jumlah pelanggaran yang dikenai Tipiring (Tindak Pidana Ringan)				
2.3		Penyuluhan Perda dan perkada	Jumlah sasaran penyuluhan perda dan perkada				
<b>3</b>		<b>Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penurunan Jumlah PEKAT</b>				

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		3.1	Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah PEKAT yang ditangani Jumlah operasi dalam 1 tahun		
		3.2	Pengembangan Sumberdaya Manusia Satpol PP	Jumlah Personil Satpol PP yang mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang Satpol PP		
		4	<b>Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	<b>Persentase Penurunan Barang Cukai Ilegal yang Diamankan</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	
		4.1	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Pita Cukai yang bukan Haknya, Pita Cukai yang salah Peruntukan, Pita Cukai Bekas dan Tanpa Pita Cukai Diperedaran dan Tempat Penjualan Eceran	Jumlah Toko / Warung yang Didata terkait Informasi Barang Cukai Ilegal	Dana Khusus (DBHCHT)	
		5	<b>Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	
		5.1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Dana Khusus (DBHCHT)	
A.1.5.2	<b>Sub Urusan Bencana dan Kebakaran</b>	1	<b>Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>BPBD</b>
	1.1	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%			
	1.2	Kegiatan Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu			

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		1.3	Kegiatan Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana</b>		
		2.1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana		
		2.2	Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang tertangani		
		2.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Rehabilitasi Korban Bencana yang ditangani. Persentase Rekonstruksi Dampak Bencana yang ditangani.		
		<b>3</b>	<b>Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran</b>	Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsif time Persentase peningkatan kompetensi anggota Linmas		<b>Satpol PP</b>
		3.1	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah kebakaran yang ditangani sesuai responsif time		
				Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi bahaya kebakaran		
		3.2	Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Jumlah LINMAS yang mendapat pembinaan		
		<b>A.1.6</b>	<b>Sosial</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>
1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%				
1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu				

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan dan rehabilitasi Sosial</b>		
		2.1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		
		2.2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	Dana Khusus (DBHCHT)	
		2.3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		
		2.4	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		
				Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		
		2.5	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah dan Lansia Produktif yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	Dana Khusus (DBHCHT)	
		2.6	Pelatihan Kerja Bagi Tuna Sosial	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelatihan Kerja	Dana Khusus – Pajak Rokok	
		<b>3</b>	<b>Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial</b>		
		3.1	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi	Jumlah Sasaran dari Orsos yang mendapatkan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sosial		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Sosial			
		3.2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	Dana Khusus (DBHCHT)	
		3.3	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Warga Miskin yang Mendapatkan Layanan Kemiskinan		
				Jumlah Warga Miskin yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha		
		3.4	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	Dana Khusus (DBHCHT)	
		3.5	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial		
		<b>4</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Jaminan Sosial</b>		
		4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana	Jumlah Sasaran yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Bencana Berbasis Masyarakat		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial		
		4.2	Advokasi dan Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi dari LK3		
		4.3	Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial	Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		
<b>A.2</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>					
<b>A.2.1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>Disnaker</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
	1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
	1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
	<b>2</b>	<b>Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase peningkatan kesempatan kerja</b>		
	2.1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)		
	2.2	Usaha mandiri sektor informal	Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan bagi pelaku usaha.		
	2.3	Pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah peserta Pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan		
	2.4	Pengelolaan Balai Latihan Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan		
	<b>3</b>	<b>Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja</b>	▪ <b>Persentase penurunan kasus tenaga kerja</b> ▪ <b>Persentase Kepesertaan Jamsostek</b>		
	3.1	Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek kelembagaan hubungan industrial.		
	3.2	Penerapan Deteksi Dini	Jumlah Penurunan kasus hubungan industrial menurun.		
	3.3	Pembinaan Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	Jumlah peserta yang mengikiti sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)		
	<b>4</b>	<b>Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT )</b>	
	4.1	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan yang tersedia	Dana Khusus (DBHCHT )	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
A.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%		DP3AKB
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		2	Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)		
		2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas		
		2.2	Penguatan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi		
		2.3	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga politik, organisasi wanita		
				Persentase organisasi wanita yang berperan aktif dalam pembangunan		
		3	Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	Dana Khusus (DBHCHT)	
		3.1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Dana Khusus (DBHCHT)	
		4	Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektifitas P2TP2A dalam		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				<p>penanganan permasalahan perempuan dan anak</p> <p><b>Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak</b></p>		
		4.1	Peningkatan Perlindungan Perempuan	<p>Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan</p> <p>Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan</p> <p>Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan perempuan</p>		
		4.2	Pengarusutamaan Hak dan Tumbuh Kembang Anak	<p>Jumlah Kampung Ramah Anak yang diinisiasi</p> <p>Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak</p> <p>Jumlah PATBM</p>		
		4.3	Peningkatan Perlindungan Anak	<p>Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani dan diselesaikan</p> <p>Persentase pekerja anak yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan</p> <p>Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan anak</p>		
<b>A.2.3</b>	<b>Pangan</b>	<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>Disperta KP</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	<p>a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu</p> <p>b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%</p>		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	<p>a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran</p> <p>b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu</p> <p>c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</p>		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		<b>2</b>	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	Skor Pola Pangan Harapan		
		2.1	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan		
		2.2	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pembinaan		
				Jumlah Cadangan Pangan		
		2.3	Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Persentase Konsumsi Pangan yang Aman		
		<b>3</b>	<b>Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Peningkatan Kelompok Olahan Pangan yang difasilitasi</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	
		3.1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat bagi Pelaku Agribisnis	Jumlah Kelompok Agribisnis yang mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja	Dana Khusus (DBHCHT)	
		3.2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Keterampilan Pangan Lokal	Jumlah produk hasil olahan pangan lokal	Dana Khusus (DBHCHT)	
3.3	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Produk Pangan yang mendapatkan fasilitasi promosi	Dana Khusus (DBHCHT)			
<b>A.2.4</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pertanahan</b>	<b>Persentase Tanah Bersertifikat</b>		<b>Disperkim</b>
		1.1	Perencanaan Pertanahan	Jumlah Kelurahan yang memiliki Profil Pertanahan		
		1.2	Fasilitasi Pertanahan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan		
		1.3	Pengendalian Pertanahan	Persentase Rekomendasi Teknis Atas Rencana Penggunaan Tanah		
<b>A.2.5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>DLH</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
	1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
	<b>2</b>	<b>Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Mutu Air dan Udara dengan kualitas baik</b>		
	2.1	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup		
	2.2	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Nilai kualitas udara dan kualitas air yang memenuhi baku mutu		
	2.3	Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup	Persentase Permohonan Kajian Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan rekomendasi teknis		
	2.4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah titik sampel Mutu air dan Kualitas udara yang di uji	UPT	
	2.5	Peningkatan Sanitasi Perkotaan	Jumlah IPAL yang diserahkan kepada masyarakat yang memiliki usaha	Dana Khusus (DAK)	
	2.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah Penambahan Peralatan Laboratorium Untuk Pemantauan Kualitas Air	Dana Khusus (DAK)	
	<b>3</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi RTH dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Prosentase Tutupan Lahan Publik</b>		
	3.1	Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Mata Air yang terpelihara		
	3.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Taman dan RTHKP) yang dipelihara		
	3.3	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran peningkatan kapasitas	Perlu penyesuaian Nomenklatur Jabatan Seksi	
	<b>4</b>	<b>Pengembangan Kinerja Pengelolaan</b>	<b>Prosentase timbulan sampah yang terlayani</b>		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			<b>Persampahan</b>			
		4.1	Mobilisasi dan Penanganan Sampah	Jumlah Sampah yang terangkut		
		4.2	Pengelolaan Taman Pemrosesan Akhir (TPA)	Jumlah sampah yang dikelola di TPA		
		4.3	Penanggulangan Sampah	Jumlah ruas jalan Kota dan Lokasi yang dilakukan penyapuan serta cipta kondisi		
		4.4	Pengolahan Sampah	Jumlah Sampah Terolah	UPT	
		4.5	Pengembangan Pengolahan Sampah Skala Kawasan	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Sampah Kawasan	Dana Khusus (DAK)	
		4.6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung TPA	Dana Khusus (DAK)	
		<b>5</b>	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang ikut berperan aktif dalam Pengelolaan Lingkungan</b>		
		5.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat serta lembaga terkait yang berperan aktif dalam mengelola lingkungannya		
		5.2	Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok mitra peduli lingkungan yang aktif dan mandiri		
		5.3	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelurahan yang mendukung dalam Aksi mitigasi Adaptasi Perubahan iklim		
		5.4	Pengelolaan Informasi dan edukasi lingkungan	Jumlah lembaga pendidikan yang meraih adiwiyata	UPT	
<b>A.2.6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>Dispendukpil</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		2	<b>Pelayanan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el</b>		
				<b>Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)</b>		
				<b>Jumlah Penduduk Pindah Datang yang diData</b>		
		2.1	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Pemohon KTP-el Yang dilayani		
				Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Yang dilayani		
				Jumlah Pemohon KIA Yang dilayani		
		2.2	Pelayanan Administrasi Pindah Datang Penduduk	Jumlah Pemohon Pindah Datang Yang dilayani		
				Jumlah Pemohon Pindah Keluar Yang dilayani		
		2.3	Pendataan Penduduk	Jumlah Penduduk Yang Diberikan NIK		
		2.4	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah Bahan Cetak Dokumen Kependudukan	Dana Khusus (DAK)	
		2.5	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Rakor dan Konsultasi yang dilaksanakan	Dana Khusus (DAK)	
		2.6	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Keliling di Sekolah	Dana Khusus (DAK)	
		3	<b>Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran</b>		
				<b>Jumlah Penduduk Meninggal yang Memiliki Akte Kematian</b>		
				<b>Jumlah Penduduk Yang Dilayani Pencatatan Peristiwa Penting</b>		
		3.1	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Yang Dilayani		
		3.2	Pelayanan P4-K (Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian)	Jumlah Pemohon Akta Perkawinan Yang Dilayani		
				Jumlah Pemohon Akta Perceraian Yang Dilayani		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				Jumlah Pemohon Akta Perubahan Nama Yang Dilayani		
				Jumlah Pemohon Pembetulan Akta Yang Dilayani		
				Jumlah Pemohon Akta Kematian Yang Dilayani		
		3.3	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jumlah pelaksanaan rakor yang dilaksanakan	Dana Khusus (DAK)	
		3.4	Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil	Jumlah jenis blanko dan formulir yang dicetak	Dana Khusus (DAK)	
		4	<b>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pembangunan Daerah</b>		
				<b>Persentase Jaringan SIAK Dalam Kondisi Baik</b>		
		4.1	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana SIAK Yang Dipelihara		
		4.2	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan dan Penyajian Data Yang Disusun Tepat Waktu		
		4.3	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kerjasama dan Inovasi Yang Dilaksanakan		
4.4	Penyusunan Buku Data Penduduk per Semester	Jumlah dokumen yang dicetak	Dana Khusus (DAK)			
4.5	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta yang Mendapatkan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Khusus (DAK)			
<b>A.2.7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif</b>		<b>Kecamatan</b>
		1.1	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah kelompok dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi		
		1.2	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan.....	Jumlah kelompok dan lembaga kemasyarakatan RT / RW yang difasilitasi	DAU Tambahan untuk Dana Kelurahan	
		1.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan .....	a. Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Dana Kelurahan	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				b. Jumlah Penerima Sarana Pemberdayaan Masyarakat		
		1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan .....	a. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dibangun b. Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang dipelihara	Dana Kelurahan	
		2	<b>Program Keberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>Dinsos</b>
		2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat		
<b>A.2.8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>1</b>	<b>Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif</b>		<b>DP3AKB</b>
		1.1	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah alat dan obat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur di Fasilitas Kesehatan yang tersedia		
		1.2	Jaminan Pelayanan Kb Dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana	Jumlah aseptor KB baru yang dilayani		
		1.3	Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina dan kelompok UPPKS yang aktif		
		1.4	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang program keluarga berencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana program KB	Dana Khusus (DAK)	
		<b>2</b>	<b>Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan</b>	<b>Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu</b> <b>Persentase institusi masyarakat pedesaan dan kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) yang aktif</b>		
		2.1	Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data KB / KS per Kelurahan yang disusun tepat waktu		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		2.2	Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB	Jumlah PLKB dan Kader KB yang memenuhi target		
		2.3	Advokasi Dan Penggerakan Masyarakat	Persentase PUS yang tidak mengikuti KB ( <i>unmeet need</i> )		
		2.4	Penunjang operasional keluarga berencana	Jumlah kader KB aktif	Dana Khusus (DAK)	
<b>A.2.9</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>Dishub</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal</li> <li>▪ Jumlah Pelanggaran Trayek Angkutan Jalan</li> <li>▪ Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR</li> </ul>		
		2.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal		
		2.2	Peningkatan Pengendalian, Pengawasan, dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Angkutan Jalan yang Memiliki Ijin Trayek		
		2.3	Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah Pemilik / Sopir Angkutan Jalan yang Mengikuti Pembinaan Keselamatan		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				Transportasi		
		2.4	Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melakukan Uji KIR	UPT	
		2.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	Dana Khusus (DAK / Banprop)	
		<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Transportasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal</b></li> <li>▪ <b>Prosentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan</b></li> <li>▪ <b>Prosentase penurunan Jumlah Pelanggaran Kapal &lt;7GT</b></li> </ul>		
		3.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal		
		3.2	Perencanaan Pengembangan Transportasi	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perhubungan		
		3.3	Pembinaan dan Pengendalian Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Kapal &lt;7GT yang memiliki dokumen Kapal</li> <li>▪ Jumlah Kapal &lt;7GT yang mendapatkan pembinaan</li> </ul>		
		3.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal	Dana Khusus (DAK / Banprop)	
<b>A.2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>Diskominfo</b>
		1.1	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu</li> <li>b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%</li> </ul>		
		1.2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran</li> <li>b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu</li> <li>c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</li> </ul>		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
	<b>2</b>	<b>Pengembangan Komunikasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase peningkatan media komunikasi yang dikelola</b>		
	2.1	Pengelolaan Layanan Media Komunikasi	Jumlah media internal pemerintah yang dikelola		
	2.2	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah isu publik yang dikelola		
	2.3	Pengelolaan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang difasilitasi		
	<b>3</b>	<b>Pengelolaan Informasi Publik</b>	<b>Persentase permohonan informasi yang dipenuhi</b>		
	3.1	Pelayanan informasi publik	Jumlah Informasi yang didesiminasikan		
	3.2	Pengelolaan Konten Informasi	Jumlah konten informasi yang disediakan		
	<b>4</b>	<b>Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi</b>		
	4.1	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi	Persentase down time infrastruktur jaringan		
	4.2	Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem Informasi	Persentase sistem informasi yang terintegrasi		
	4.3	Pengendalian dan pengawasan bidang telekomunikasi	Persentase menara telekomunikasi yang memenuhi standar		
	<b>5</b>	<b>Pengelolaan e-Government</b>	<b>Indeks e-Government</b>		
	5.1	Pengembangan aplikasi e-government	Jumlah aplikasi PD yang dikembangkan		
	5.2	Pengembangan ekosistem e-government	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan TIK		
	5.3	Peningkatan tata kelola e-government	Jumlah PD yang menerapkan Tata kelola TI sesuai standar		
	5.4	Pengelolaan LPSE	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE		
	5.5	Pembinaan dan Pengembangan e-government	Jumlah SDM TIK yang mengikuti pelatihan e-government	Dana Khusus (Pajak Rokok)	
	<b>6</b>	<b>Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Prosentase informasi kegiatan bidang cukai yang disampaikan</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		6.1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah media publikasi kebijakan cukai	Dana Khusus (DBHCHT)	
A.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>DKUPP</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>		
		2.1	Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kapasitas Koperasi	Jumlah SDM pengelola koperasi yang terstandarisasi/kompeten		
				Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT Tepat Waktu		
		2.2	Penertiban dan Pengawasan Koperasi Melalui Akuntabilitas	Jumlah Koperasi Yang Mempunyai Derajat Kepatuhan Berkoperasi		
		2.3	Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Dukungan Perkuatan Permodalan		
		2.4	Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing SDM KUMKM	Jumlah SDM pengelola KUMKM yang Kompeten dan Berdaya Saing	Dana Khusus (DAK)	
		<b>3</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>Persentase Kenaikan Omzet Usaha Mikro yang Difasilitasi</b>		
3.1	Fasilitasi Pengembangan Promosi dan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Difasilitasi				

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Pemasaran produk usaha mikro	Promosi dan Pemasaran Produk		
		3.2	Penguatan Kewirausahaan, Manajemen dan Organisasi Usaha Mikro	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menerapkan pengelolaan Manajemen yang terpisah		
				Jumlah Pelaku Usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan		
		3.3	Pengembangan Mutu Produk dan Prasarana Produksi Bagi Usaha Mikro	Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapatkan Pembinaan Pengembangan mutu produk		
				Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapatkan prasarana produksi		
<b>A.2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>1</b>	<b>Kinerja Lembaga dan Apratur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>DPMPTSP</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Persentase Izin yang Terbit Tepat Waktu</b>		
		2.1	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan	Jumlah Izin Bidang Pembangunan yang Terbit Tepat Waktu		
		2.2	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa	Jumlah Izin Bidang Perdagangan dan Jasa yang Terbit Tepat Waktu		
		2.3	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan	Jumlah Izin Bidang Kesehatan yang Terbit Tepat Waktu		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		<b>3</b>	<b>Pengelolaan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Terintegrasi</b>		
		3.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal	Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi Perizinan yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha		
				Jumlah Pelaporan Penanaman Modal yang Dilaksanakan		
		3.2	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Terintegrasi		
		<b>4</b>	<b>Peningkatan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan</b>		
		4.1	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Kajian Inventarisasi Potensi dan Peluang Investasi yang Dilaksanakan		
		4.2	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan		
				Jumlah Kerjasama yang Dilaksanakan		
		<b>5</b>	<b>Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Tertib Izin/Ketentuan Penanaman Modal</b>		
		5.1	Pengelolaan Penanganan Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti		
		5.2	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan yang Ditangani		
<b>A.2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Mutu Kepemudaan dan Keolahragaan</b>	<b>Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga yang dicapai</b>		<b>Disdikpora</b>
		1.1	Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda aktif yang dibina		
		1.2	Peningkatan Mutu Keolahragaan	Jumlah Cabang Olah Raga prestasi dan Olah Raga Rekreasi yang dibina		
<b>A.2.14</b>	<b>Statistik</b>	<b>1</b>	<b>Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah</b>	<b>Persentase release data statistik tepat waktu</b>		<b>Diskominfo</b>
		1.1	Pelayanan dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dirilis		
		1.2	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang diolah		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
A.2.15	Persandian	1	<b>Peningkatan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan</b>		Diskominfo
		1.1	Pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah Sistem Elektronik yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik		
A.2.16	Kebudayaan	1	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		Disbudpar
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		2	<b>Pelestarian dan Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Cakupan budaya lokal yang dilestarikan</b>		
		2.1	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Jumlah Sanggar Seni yang memperoleh pembinaan		
		2.2	Pengelolaan Museum dan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Bangunan cagar budaya dalam kondisi lestari / terpelihara		
				Jumlah benda koleksi yang terpelihara		
		2.3	Pelestarian Tradisi dan Pemberdayaan Kelembagaan Budaya	Jumlah budaya daerah yang ditelusuri dan direvitalisasi		
Jumlah lembaga budaya yang diberdayakan						
A.2.17	Perpustakaan	1	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		Disperpusip
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan</b>	<b>Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan</b>		
		2.1	Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah Jumlah bahan pustaka yang dilestarikan		
		2.2	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan yang terlayani		
		<b>3</b>	<b>Pembinaan dan Pemasyarakatan Perpustakaan</b>	<b>Persentase perpustakaan dan taman bacaan yang dibina</b> <b>Persentase peningkatan sasaran pemasyarakatan perpustakaan</b>		
		3.1	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Jumlah Taman Bacaan yang Dibina		
		3.2	Pemasyarakatan Perpustakaan	Jumlah Sasaran Pemasyarakatan perpustakaan		
<b>A.2.18</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola</b>		<b>Disperpusip</b>
		1.1	Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dikelola		
		1.2	Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dikelola		
		<b>2</b>	<b>Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standart</b> <b>Persentase peningkatan sasaran pemasyarakatan kearsipan</b>		
		2.1	Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan kearsipan sesuai standart		
		2.2	Pemasyarakatan Kearsipan	Jumlah Sasaran Pemasyarakatan Kearsipan		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH	
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
B.1	Perikanan	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		Dinas Perikanan
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Pengembangan Usaha Perikanan</b>	<b>Persentase Peningkatan Volume Produksi Usaha Perikanan Tangkap</b> <b>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok</b>		
		2.1	Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap		
				Jumlah Nelayan yang Mendapat Fasilitas		
		2.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perikanan	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan Kelembagaan		
				Jumlah Kelompok Baru yang Terbentuk		
		2.3	Pengembangan Mutu dan Promosi Hasil Perikanan	Jumlah Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) yang Mendapat Fasilitas Promosi		
				Jumlah Produk yang mendapat Sertifikasi		
		2.4	Pengelolaan UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Layanan dari UPT PMPHP	UPT	
				Capaian Target PAD PMPHP		
		2.5	Pengelolaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Layanan dari UPT TPI	UPT	
Capaian Target PAD TPI						

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	2.6	Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Nelayan	Jumlah KUB yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Dana Khusus (DAK)	
	<b>3</b>	<b>Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan dibidang perikanan</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	
	3.1	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Mendapat Fasilitasi Promosi	Dana Khusus (DBHCHT)	
	3.2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pengolah dan Pemasar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Mendapat Fasilitasi Pelatihan Olahan Hasil Perikanan	Dana Khusus (DBHCHT)	
	3.3	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mendapat Pelatihan Budidaya Ikan	Dana Khusus (DBHCHT)	
	<b>4</b>	<b>Pengembangan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Volume Produksi Budidaya</b>		
	4.1	Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Volume Produksi Budidaya Ikan Konsumsi		
	4.2	Pengembangan Pembenihan Ikan	Jumlah Volume Produksi Benih Ikan Konsumsi Jumlah Volume Produksi Benih Ikan Hias		
	4.3	Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan	Jumlah Petak Budidaya yang Mendapat Perlakuan Jumlah Perairan Darat yang Direstocking		
	4.4	Pengelolaan Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	Jumlah Volume Produksi Benih di UPT Jumlah Volume Produksi Ikan Konsumsi Capaian target PAD UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	UPT	
	4.5	Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Konsumsi yang Mendapat Bantuan	Dana Khusus (DAK)	
	4.6	Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan Hias	Jumlah Pembudidaya Ikan Hias yang Mendapat Bantuan	Dana Khusus (DAK)	
	4.7	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembenihan	Dana Khusus (DAK)	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
B.2	Pariwisata	1	Pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase destinasi wisata yang berkembang		Disbudpar		
				Persentase Industri Pariwisata yang berkembang				
				Persentase Komunitas ekonomi kreatif yang berkembang				
		1.1	Pengelolaan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan				
		1.2	Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah pembinaan usaha jasa pariwisata				
		1.3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan komunitas ekonomi kreatif pendukung pariwisata				
		1.4	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang memiliki sarana dan prasarana memadai	Dana Khusus (DAK)			
		1.5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan	Jumlah peserta pembinaan ekonomi kreatif	Dana Khusus (DAK)			
		2	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pemasaran pariwisata				
		2.1	Pengembangan Data dan Informasi Kepariwisataan	Jumlah pengguna Informasi Pariwisata				
2.2	Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata	Jumlah kerjasama pariwisata						
2.3	Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pariwisata						
B.3	Pertanian	1	Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Disperta KP		
				1.1			Peningkatan Produksi dan Olahan Hasil Perkebunan	Jumlah luas panen komoditas tanaman perkebunan
				1.2			Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produk Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Mendapatkan Nilai Hasil Tambah
				1.3			Peningkatan Produksi Tanaman	Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		Pangan dan Hortikultura			
	<b>2</b>	<b>Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan</b>	<b>Prosentase Peningkatan Produksi Ternak</b> <b>Prosentasi peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Peternakan</b>		
	2.1	Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Capaian target PAD		
	2.2	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah Produk bahan pangan dan non pangan asal hewan yang mendapatkan nilai tambah Jumlah Produk Hasil Peternakan yang Mendapat Fasilitas Pemasaran		
	<b>3</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Peningkatan Usaha Peternakan</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	
	3.1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga dan Masyarakat melalui Pelatihan Usaha Peternakan Kelompok Tani Ternak	Persentase Kelompok Tani Ternak yang mendapatkan pembinaan, pelatihan usaha peternakan	Dana Khusus (DBHCHT)	
	3.2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan dan Bimbingan Pengolahan Hasil Ternak	Jumlah produk olahan pangan asal hewan	Dana Khusus (DBHCHT)	
	<b>4</b>	<b>Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Prosentase Penurunan Angka Kematian Hewan yang dilayani</b>		
	4.1	Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	4.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pemotongan Hewan yang Diawasi Jumlah produk hewan yang asuh dan berkualitas yang beredar di kota		
	4.3	Pengelolaan Pemotongan Hewan	Jumlah Pemotongan Hewan Ruminansia yang ASUH di UPT RPH	UPT. RPH	
	<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan</b>	<b>Persentase Peningkatan Luasan Lahan Pertanian yang Mendapat Prasarana dan Sarana Pertanian</b>		
	5.1	Peningkatan Sarana Prasarana	Jumlah Prasarana dan Sarana Produksi yang		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Produksi	Dibangun dan Direhabilitasi		
		5.2	Peningkatan Pengelolaan Pupuk dan Alat Mesin Pertanian (Alsitan)	Jumlah Petani yang Mendapat Pembinaan Alsitan		
				Jumlah Sasaran Pengawasan Pupuk		
		5.3	Pembiayaan Investasi dan Penyuluhan	Jumlah Petani yang Terfasilitasi Pembiayaan dan Penyuluhan		
		5.4	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	Dana Khusus (DAK)	
<b>B.4</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>1</b>	<b>Pengembangan Usaha Perdagangan</b>	<b>Volume Perdagangan</b>		<b>DKUPP</b>
		1.1	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan	Jumlah Pasar dengan manajemen yang baik		
				Jumlah Sentra PKL dan Asongan yang tertata		
		1.2	Pengawasan, Promosi dan Informasi Perdagangan	Jumlah Produk Lokal yang terlibat dalam promosi perdagangan antar daerah		
				Jumlah Pengawasan terhadap stok harga barang		
		1.3	Peningkatan dan Pengembangan Kemetrollogian	Jumlah Pelaku usaha yang sadar tera		
		1.4	Pengelolaan dan Pelayanan Pasar	Prosentase pasar yang terstandarisasi	UPT Pasar	
		1.5	Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrollogian Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Tera	Dana Khusus (DAK)	
		1.6	Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah Pasar yang Terevitalisasi	Dana Khusus (DAK)	
<b>B.5</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>1</b>	<b>Pengembangan Industri</b>	<b>Persentase Pengembangan IKM</b>		<b>DKUPP</b>
		1.1	Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat keterampilan usahanya		
		1.2	Pemberdayaan Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri		
		1.3	Peningkatan Daya Saing dan Akses Industri	Jumlah Peningkatan Pelaku dan Sentra Industri yang berdaya saing		
				Jumlah Pelaku dan Sentra Industri yang mendapatkan fasilitasi untuk promosi produk unggulan		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		2	Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Embrio industri kecil yang mendapatkan pembinaan	Dana Khusus (DBHCHT)	
		2.1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri Kecil yang mendapatkan pelatihan	Dana Khusus (DBHCHT)	
		2.2	Fasilitasi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Produk Industri Kecil yang dipromosikan	Dana Khusus (DBHCHT)	
<b>C</b>	<b>Penunjang</b>					
C.1	Unsur Staff	1	Peningkatan Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%		Sekretariat Daerah
		1.1	Pengelolaan Tata Usaha	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu d. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Indikator Khusus <b>BAGIAN UMUM</b>	
		1.2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		1.4	Pengelolaan Kerumahtanggaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan Daerah	<b>BAGIAN UMUM</b>	
		1.5	Pengelolaan Perlengkapan	Jumlah Sarana Prasarana dengan kondisi baik	<b>BAGIAN UMUM</b>	
		2	Dukungan Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan yang ditetapkan di bidang Kesejahteraan Rakyat	<b>BAGIAN KESRA</b>	
		2.1	Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan / dilaksanakan		
		2.2	Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat di Bidang Dikporabudpar	Persentase Kebijakan Bidang Dikporabudpar		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	2.3	Fasilitasi Bina Mental dan Keagamaan	Persentase Jamaah / Calon Jamaah Haji dan Peserta MTQ yang terfasilitasi Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi		
	<b>3</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Manajemen Administrasi Pembangunan</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	
	3.1	Perencanaan Program Infrastruktur	Persentase capaian program pembangunan OPD sesuai RPJMD		
	3.2	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tepat waktu		
	3.3	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan yang terpenuhi tepat waktu		
	<b>4</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Bidang Hukum</b>	<b>Persentase Produk dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas</b> <b>Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>	
	4.1	Penataan Peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Dilakukan Harmonisasi		
	4.2	Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Perkara Hukum yang diberikan Bantuan Hukum		
	4.3	Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda dan Perwali) yang Diinformasikan		
	<b>5</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan</b>	<b>Nilai IKM Kehumasan dan Keprotokolan</b>	<b>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>	
	5.1	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase layanan keprotokolan yang dilaksanakan		
	5.2	Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Kepala Daerah yang Terdokumentasikan		
	5.3	Peningkatan Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan dan Pernyataan Resmi Kepala Daerah yang Terpublikasi		
	<b>6</b>	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase PD yang memenuhi data Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>	

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			<b>Perundangan yang berlaku</b>		
	6.1	Pengembangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Kunci LPPD yang terpenuhi		
	6.2	Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Jumlah Kecamatan Berkinerja Baik		
	6.3	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Persentase Naskah Kerjasama yang diimplementasikan		
	6.4	Fasilitasi Hari Jadi Provinsi	Jumlah Kegiatan Hari Jadi Provinsi yang dilaksanakan	Dana Khusus (Banprop)	
	<b>7</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>	
	7.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kajian dan Evaluasi Kelembagaan Persentase OPD yang melengkapi Dokumen Akuntabilitas Kinerja Persentase Variabel Penilaian Reformasi Birokrasi		
	7.2	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD yang menyusun dokumen SPP, SOP dan SKM Persentase OPD yang melaksanakan SKM Persentase OPD yang membentuk KBK Persentase OPD yang memiliki inovasi		
	7.3	Penyelenggaraan Analisis Jabatan dan Pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase OPD yang ditetapkan Analisis Jabatannya Persentase OPD yang ditetapkan Evaluasi Jabatannya Persentase OPD yang ditetapkan Peta Jabatannya Persentase OPD yang ditetapkan Standar Kompetensi Jabatannya Persentase Administrasi Kepegawaian Aparatur Setda yang ditangani tepat waktu		
	<b>8</b>	<b>Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah</b>	<b>Persentase kebijakan Bidang Perekonomian yang Dimanfaatkan</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b>	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		8.1	Fasilitasi Bina Ekonomi Daerah	Persentase kebijakan Bina Ekonomi daerah yang dimanfaatkan		
		8.2	Fasilitasi Bina Potensi dan Sumberdaya Daerah	Persentase kebijakan Bina Potensi dan Sumberdaya Daerah yang dimanfaatkan		
		8.3	Fasilitasi Bina Usaha Daerah	Persentase kebijakan Bina Usaha daerah yang dimanfaatkan		
				Jumlah Laporan Pengendalian Inflasi Daerah yang Tepat Waktu		
		<b>9</b>	<b>Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase layanan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan</b>	<b>UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa)</b>	
		9.1	Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Tepat Waktu		
		9.2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	a. Jumlah Orang yang memahami Pengadaan Barang dan Jasa b. Jumlah Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang diselesaikan		
		9.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tepat waktu		
		<b>10</b>	<b>Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan bidang cukai diatas 80%</b>	<b>Dana Khusus (DBHCHT)</b>	
		10.1	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai yang tepat Waktu	Dana Khusus (DBHCHT)	
		<b>11</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>Sekretariat DPRD</b>
		11.1	Pengelolaan Tata Usaha	a. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu b. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		11.2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu c. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
		11.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		11.4	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan, kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan perlengkapan, kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD		
		<b>12</b>	<b>Peningkatan Daya Dukung Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Anggota DPRD</b>		
		12.1	Pengelolaan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Perundangan-undangan Yang Ditelaah		
				Jumlah Rancangan Perda yang Disahkan		
		12.2	Pengelolaan Rapat dan Risalah	Jumlah Rekomendasi DPRD		
<b>C.2</b>	<b>Fungsi Pengawasan</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Rutin / Kesekretariatan</b>	<b>Inspektorat</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Good Govenance Pemerintah Kota</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB</b> <b>Persentase Perangkat Daerah yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinisi"</b> <b>Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah</b>		
		2.1	Pemantapan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	sesuai dengan kaidah dan tertib waktu		
				Jumlah OPD yang menyusun LKD sesuai dengan SAP		
				Jumlah OPD yang menyusun LPPD dengan capaian kinerja sangat tinggi		
				Jumlah OPD yang nilai SAKIP-nya minimal BB		
		2.2	Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan zona integritas menuju WBK/ WBBM		
				Jumlah OPD yang melaksanakan maturitas SPIP sesuai aturan atau standard		
				Persentase TLHP yg selesai ditindaklanjuti		
		2.3	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan yang telah terbebas dari temuan yang bersifat material		
				Jumlah hasil pengawasan yang terekspos		
		2.4	Pemantapan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah OPD yang melaksanakan RAD-PK		
				Persentase ASN yang melaporkan harta kekayaannya		
				Persentase penurunan pungutan liar		
				Persentase penurunan gratifikasi		
		2.5	Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti		
				Persentase permasalahan pengawasan yang ditindaklanjuti		
<b>C.3</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>C.3.1</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>Bappeda Litbang</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
	1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
	<b>2</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan dokumen perencanaan</b>		
	2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah tepat waktu		
			Persentase usulan musrenbang yang diakomodir di RKPD		
	2.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah program dengan capaian nilai minimal 80%		
	2.3	Peningkatan Pembiayaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan yang didanai oleh non APBD Kota		
	<b>3</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Persentase OPD lingkup bidang ekonomi yang menyusun dokumen berkualitas baik</b>		
	3.1	Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan ekonomi		
	<b>4</b>	<b>Perencanaan, Pembangunan Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase OPD lingkup bidang Infrastruktur, pengembangan wilayah dan sumber daya alam yang menyusun dokumen berkualitas baik</b>		
	4.1	Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan prasarana wilayah		
	4.2	Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS)	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	dalam perencanaan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup		
		4.3	Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pembangunan Perumahan Permukiman	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan perumahan permukiman		
		<b>5</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase OPD lingkup bidang pembangunan manusia, sosial dan budaya yang menyusun dokumen berkualitas baik</b>		
		5.1	Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan manusia		
		5.2	Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah program yang dikoordinasikan, diintegrasikan, disinkronisasi dan disinergikan dalam perencanaan pembangunan sosial budaya		
<b>C.3.2</b>	<b>Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>BPPKAD</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pajak Daerah</b>		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	2.1	Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Mendapatkan Penetapan Tarif		
			Jumlah Penerbitan NPWPD Wajib Pajak Baru		
	2.2	Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Wajib Pajak		
			Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Tepat Waktu		
	<b>3</b>	<b>Peningkatan Penerimaan PBB &amp; BPHTB</b>	<b>Persentase Peningkatan PBB dan BPHTB</b>		
	3.1	Pendataan dan Penilaian PBB & BPHTB	Jumlah Obyek Pajak yang dimutakhirkan		
			Persentase Berkas Pelayanan PBB dan BPHTB yang diselesaikan		
	3.2	Pengelolaan Data PBB & BPHTB	Jumlah SPPT dan DBHKP PBB yang diterbitkan dan didistribusikan		
			Jumlah Data Digital dan Data Spasial yang telah direkonsiliasi		
			Persentase Kesesuaian Data Penerimaan PBB dan BPHTB		
	3.3	Pengelolaan Penagihan PBB & BPHTB	Nilai Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB		
			Nilai Piutang PBB yang terselesaikan		
	<b>4</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah</b>		
	4.1	Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Persentase Tanah dan Bangunan Yang Disertifikatkan		
			Persentase Tanah dan Bangunan Yang Dimanfaatkan sesuai peruntukannya		
4.2	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase perencanaan barang milik pemerintah daerah yang sesuai kebutuhan			
4.3	Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Pemerintah Daerah yang terinventarisir			
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Yang Terkendali</b>			
5.1	Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Ketepatan Posisi Kas Harian			

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				Persentase Laporan DTH dan RTH Tepat Waktu		
				Persentase Potensi PAD dari Penempatan Dana Daerah		
		5.2	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Antara SKPD dan SKPKD		
				Persentase GNNT di Pemerintah Kota		
				Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Non RKUD		
		5.3	Pengendalian Belanja Daerah	Persentase Ketepatan Penerbitan SP2D		
				Persentase Ketepatan Penerbitan SP3B		
		6	<b>Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah Menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas</b>		
		6.1	Pengembangan Manajemen Akuntansi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan proses akuntansi sesuai standar		
		6.2	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan PPKD yang Akuntabel		
		7	<b>Perencanaan Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan Anggaran OPD yang berkualitas</b>		
		7.1	Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RKA tepat waktu		
7.2	Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RKA sesuai peraturan yang berlaku				
C.3.3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		BKPSDM
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran		

URUSAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
	1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
	<b>2</b>	<b>Pengelolaan Formasi dan Mutasi Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Ditempatkan sesuai dengan Analisis Jabatan</b> <b>Persentase Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terselesaikan</b>		
	2.1	Pengelolaan Formasi dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Jabatan yang disusun kebutuhannya sesuai dengan Analisis Jabatan Jumlah usulan formasi Aparatur Sipil Negara Persentase formasi Aparatur Sipil Negara yang dipenuhi Jumlah Record Data Aparatur Sipil Negara yang diupdate / diperbaharui		
	2.2	Pengelolaan Mutasi Aparatur Sipil Negara Fungsional	Jumlah Aparatur Sipil Negara Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Fungsional Yang terselesaikan		
	2.3	Pengelolaan Mutasi Aparatur Sipil Negara Struktural	Jumlah Aparatur Sipil Negara Struktural yang ditempatkan sesuai dengan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Struktural Yang terselesaikan		
	<b>3</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Lulus Pengembangan Kompetensi</b> <b>Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara</b> <b>Persentase Aparatur Sipil Negara yang Mendapatkan Kompensasi Kinerja 100%</b>		
	3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
				Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti uji kompetensi		
				Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti program ijin belajar, tugas belajar dan ikatan dinas		
		3.2	Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II, III dan IV		
				Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar		
				Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional		
				Jumlah Usulan Jenis Diklat yang Dilaksanakan		
				Jumlah alumni Diklat yang hasil evaluasinya efektif		
		3.3	Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan pembinaan		
				Jumlah Aparatur Sipil Negara yang paham tentang kedisiplinan		
				Jumlah Pejabat wajib LHKPN yang telah melaporkan LHKPN		
				Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang melakukan sumpah		
		3.4	Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dievaluasi kinerjanya		
				Jumlah PNS yang menerima Satyalencana Karya Satya		
				Jumlah Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo		
		3.5	Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Persentase pengurusan Askem, Tapera, BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan dan Tunjangan Keluarga yang terselesaikan		
				Jumlah PNS yang akan Purna Tugas yang mendapatkan pembekalan		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
C.3.4	Penelitian dan Pengembangan	1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dikembangkan yang menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah		Bappeda Litbang
		1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya Kota Probolinggo	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya yang diimplementasikan		
		1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kota Probolinggo	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang diimplementasikan		
		1.3	Sinkronisasi Kelitbangan dan Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah OPD yang melakukan kegiatan kelitbangan Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan		
C.3.5	Fungsi Penunjang Lainnya (Kesbangpol)	1	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%		Bakesbangpol
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		2	Penguatan Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Budaya Politik	Persentase Orkesmas yang aktif Persentase lembaga yang mendapatkan penguatan pendidikan politik		
		2.1	Penguatan Lembaga Politik dan Pengembangan Etika Politik	Persentase kelompok sasaran sosialisasi dan pembinaan yang memahami budaya dan etika politik	Pre test dan post test	
		2.2	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase lembaga yang memahami peraturan	Pre test dan post	

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			Demokrasi dan HAM	tentang Lembaga Kemasyarakatan, Demokrasi dan HAM	test	
		<b>3</b>	<b>Peningkatan Kewaspadaan dan Integrasi Bangsa</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial yang menjadi konflik terbuka</b>		
		3.1	Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Potensi Konflik yang difasilitasi		
		3.2	Penguatan Ketahanan, Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa	Persentase kelompok sasaran sosialisasi dan pembinaan yang memahami tentang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa	Pre test dan post test	
<b>C.4</b>	<b>Fungsi Koordinasi</b>	<b>1</b>	<b>Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>Kecamatan</b>
		1.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	a. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu b. Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%		
		1.2	Pengelolaan Kinerja Program dan Keuangan	a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran b. Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu c. Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu		
		1.3	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		
		<b>2</b>	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan</b>		
		2.1	Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan yang tepat waktu		
		2.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)		
		2.3	Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase penurunan gangguan keamanan		
		<b>3</b>	<b>Peningkatan Penyelenggaraan</b>	<b>Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar</b>		

URUSAN		NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
			<b>Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan</b>	<b>Pelayanan</b>		
		3.1	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan.....	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu		
		3.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan .....	Jumlah RT / RW yang aktif		

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I